

"Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung: Studi Implementasi Collaborative Governance"

Farrell Surya Gemilang*), Fitriyah)**

Email: farrellgemilang@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang, 50275, Kode Pos 1269

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Banjir merupakan permasalahan tahunan di Jakarta yang mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi mitigasi, salah satunya melalui Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung. Proyek ini bertujuan mengalihkan sebagian aliran Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur guna mengurangi risiko banjir. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi aspek krusial dalam implementasi proyek ini. Penelitian ini menganalisis bentuk dan mekanisme kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menggunakan pendekatan *Collaborative Governance*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, studi dokumen, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mendominasi pengambilan keputusan, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator. Minimnya keterlibatan masyarakat serta kurangnya transparansi dalam penyebaran informasi menjadi tantangan utama dalam implementasi proyek ini. Kesimpulannya, meskipun proyek ini berdampak positif dalam mitigasi banjir, praktik kolaborasi masih belum inklusif. Diperlukan transparansi yang lebih baik, komunikasi yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif agar proyek serupa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sodedan Ciliwung, Kolaborasi Pemerintah, Mitigasi Banjir, *Collaborative Governance*

ABSTRACT

Flooding is an annual issue in Jakarta, prompting the government to implement mitigation strategies, one of which is the National Strategic Project of the Ciliwung Diversion. This project aims to divert part of the Ciliwung River's flow into the East Flood Canal to reduce flood risks. Collaboration between the central and regional governments is a crucial aspect of the project's implementation. This study analyzes the forms and mechanisms of collaboration between the central and regional governments using the Collaborative Governance approach. A descriptive qualitative method was employed, utilizing interviews, document studies, and field observations. The findings indicate that the central government dominates decision-making, while the regional government acts as a facilitator. Minimal community involvement and a lack of transparency in information dissemination are key challenges in the project's implementation. In conclusion, although this project has a positive impact on flood mitigation, its collaborative practices remain non-inclusive. Greater transparency, more effective communication, and increased public participation are necessary to ensure that similar projects are more optimal and sustainable in the future.

Keywords: Ciliwung Diversion, Government Collaboration, Flood Mitigation, Collaborative Governance

PENDAHULUAN

Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait banjir yang telah menjadi masalah tahunan. Hal itu juga terjadi dalam pengelolaan infrastruktur di Indonesia, yang menjadi tantangan besar, terutama dalam konteks urbanisasi yang pesat dan kondisi iklim yang ekstrem. Jakarta menghadapi masalah serius terkait banjir yang terjadi setiap tahun. Banjir yang melanda Jakarta tidak hanya menimbulkan kerugian material yang signifikan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan mengganggu aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Banjir di Jakarta tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi, serta menciptakan dampak lingkungan yang merugikan. Dalam menghadapi tantangan tersebut pemerintah memiliki Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merupakan program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional serta secara langsung menghadapi tantangan yang ada pada kota bersangkutan tersebut.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Collaborative Governance* menjadi sangat relevan. *Collaborative Governance* adalah pendekatan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini berorientasi pada konsensus dan musyawarah untuk mencapai tujuan bersama, yang dalam hal ini adalah penanganan banjir di Jakarta. Teori *Collaborative Governance* menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, terutama dalam konteks proyek-proyek berskala besar yang melibatkan banyak sektor. Dengan melibatkan semua pihak, program yang dijalankan dapat dikelola dengan lebih efektif, meminimalisir konflik kepentingan, dan memperkuat akuntabilitas serta transparansi dalam setiap tahap proyek.

Dan dalam mengatasi perihal tersebut, inisiasi akan Proyek Sodetan Ciliwung akan didirikan, di Jakarta proyek ini tergolong PSN dan bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama ada di ibu kota. Proyek Sodetan Ciliwung menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak bencana ini. Proyek Sodetan Ciliwung adalah proyek lanjutan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, proyek ini dimulai pengerjaannya tanggal 23 Desember 2013

oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, sedangkan Jokowi saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek Sodetan Ciliwung adalah proyek lanjutan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, proyek ini dimulai pengerjaannya tanggal 23 Desember 2013 oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Djoko Kirmanto, sedangkan Jokowi saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2015, pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung tuntas sepanjang 550 meter, tetapi setelahnya mangkrak selama 6 tahun karena persoalan pembebasan lahan. Dan pada tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan proyek Sodetan Ciliwung sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan Ciliwung 1,26 kilometer.

Banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya curah hujan, buruknya sistem drainase, serta aliran air yang tidak tertampung dengan baik, khususnya di Sungai Ciliwung. Sungai ini sering meluap karena tidak mampu menampung debit air yang meningkat drastis saat musim hujan. Salah satu solusi yang diajukan pemerintah adalah pembangunan sodetan yang menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Kanal Banjir Timur (KBT) dan Sungai Cipinang, yang diharapkan dapat mengurangi debit air yang mengalir ke wilayah Jakarta Timur dan sekitarnya. Meski solusi ini terdengar menjanjikan, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, terutama terkait kolaborasi antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek ini menjadi krusial karena melibatkan beberapa aspek penting seperti koordinasi lintas sektor, pembebasan lahan, hingga dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan sebagai penggerak utama dalam pembiayaan dan pengerjaan teknis proyek. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proyek ini berjalan sesuai dengan regulasi dan standar teknis yang ditetapkan. Kementerian juga berfungsi dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya dan kebijakan yang diperlukan untuk mendukung proyek ini.

Sementara pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, bertanggung jawab atas aspek lokal seperti pembebasan lahan, sosialisasi kepada masyarakat, dan penanganan dampak sosial, serta koordinasi lapangan. Peran pemerintah daerah sangat penting untuk menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas di lapangan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat yang akan terdampak oleh proyek. Mereka juga berfungsi sebagai mediator antara pemerintah pusat dan masyarakat sipil. Keuntungan juga akan bisa dialami oleh Pemerintah daerah yakni, dalam bentuk peningkatan kualitas hidup warga yang

tinggal di sekitar sungai. Dengan berkurangnya banjir, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akan lebih baik, yang berdampak positif pada kegiatan ekonomi, dan beserta menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan pusat, memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan infrastruktur dan mitigasi bencana.

Selain itu dalam kolaborasi ini, semua stakeholder terkait akan mendapat keuntungan. Pertama dari Pemerintah pusat dapat menunjukkan komitmen dalam mengatasi masalah banjir di Jakarta, yang merupakan isu nasional. Hal ini dapat meningkatkan legitimasi pemerintah dan memperkuat dukungan publik terhadap kebijakan infrastruktur yang diambil. Dan proyek ini memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih efektif dalam pengelolaan sumber daya air dan mengurangi biaya tanggap darurat yang seringkali diperlukan akibat banjir. Lalu dari Pemerintah daerah khususnya Pemprov DKI Jakarta, mendapatkan keuntungan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup warga yang tinggal di sekitar sungai. Dan proyek ini akan membantu pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan lokal dengan kebijakan pusat, memperkuat kapasitas mereka dalam pengelolaan infrastruktur dan mitigasi bencana. Masyarakat sipil dan pihak swasta juga memiliki keuntungan sendiri yakni adanya peningkatan peluang bisnis serta pengurangan risiko banjir, dengan berkurangnya frekuensi dan durasi genangan air, masyarakat pun dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman.

Namun, pelaksanaan proyek Sodetan Ciliwung ini tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama terkait masalah birokrasi, perbedaan prioritas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dinamika politik yang sering kali memperlambat proses pengambilan keputusan. Misalnya, proses pembebasan lahan yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta sering kali tertunda karena berbagai alasan, mulai dari perlawanan warga yang terdampak hingga minimnya sosialisasi mengenai manfaat proyek ini bagi masyarakat setempat.

Hal ini menjadi tantangan besar yang memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar proyek dapat berjalan sesuai dengan target. Tantangan lainnya adalah terkadang adanya perbedaan kepentingan juga kurangnya kepercayaan dan bahkan kurang atau terbatasnya pengetahuan juga pengalaman yang sering kali terjadi antara berbagai instansi terkait, baik di level pusat maupun daerah. Pembangunan infrastruktur besar seperti sodetan tidak hanya melibatkan satu atau dua institusi, melainkan banyak pihak, mulai dari Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, beserta Dinas-Dinas seperti Dinas Lingkungan Hidup.

Meski demikian, praktik kolaborasi ini tidak selalu berjalan mulus di lapangan. Banyak faktor yang mempengaruhi

efektivitas kolaborasi ini, seperti perbedaan kepentingan politik, alokasi sumber daya, serta keterbatasan koordinasi antar instansi. Selain itu, proyek Sodetan Ciliwung ini juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat setempat. Terdapat pihak yang mengkritik dampak yang didapat dari proyek ini, terutama terkait penataan ruang yang dinilai kurang memperhatikan aspek ekologis, karena memang proyek ini memerlukan pembebasan lahan yang cukup luas, termasuk penggusuran bangunan ilegal di sekitar lokasi proyek. Dan hal tersebut memengaruhi ekosistem lokal dan mengubah struktur ruang di daerah terkait. Hal ini menambah kompleksitas dalam pelaksanaan proyek, yang membutuhkan pendekatan kolaboratif tidak hanya antar pemerintah, tetapi juga dengan masyarakat sipil.

Proyek Sodetan Ciliwung lanjutan, sehingga total Panjang Sodetan Ciliwung 1,26 kilometer, akhirnya selesai. Pada 31 Juli 2023 diresmikan oleh Presiden Jokowi. Melihat kompleksitas masalah ini, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek Sodetan Ciliwung ini berjalan. Penelitian ini akan mengupas lebih dalam mengenai hal yang terjadi antara berbagai pihak yang terlibat serta bagaimana model Collaborative Governance dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dalam sebuah proyek infrastruktur besar seperti Program Sodetan Ciliwung ini.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek Sodedan Sungai Ciliwung.

KERANGKA TEORITIS

Teori *Collaborative Governance*: Istilah *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008). Menurut Ansell dan Gash (2007) ada 6 kriteria dalam proses Collaborative Governance:

1. Forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik
2. Partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor non pemerintah
3. Partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah
4. Forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin
5. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus
6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodedan Ciliwung. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam bentuk kerja sama, dinamika kebijakan, serta tantangan yang muncul dalam implementasi proyek ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta masyarakat terdampak. Studi dokumen melibatkan analisis terhadap kebijakan, laporan resmi, serta berita yang relevan. Sementara itu, observasi lapangan dilakukan di lokasi proyek untuk memahami secara langsung dampak implementasi Sodedan Ciliwung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis untuk menilai efektivitas komunikasi, koordinasi, serta peran masing-masing aktor dalam proyek ini. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan

gambaran menyeluruh mengenai efektivitas *Collaborative Governance* dalam implementasi Proyek Sodetan Ciliwung serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas kerja sama lintas pemerintah dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Proyek Sodetan Ciliwung

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Sodetan Ciliwung menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak, proyek ini melibatkan berbagai aktor dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah daerah dalam bentuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, serta perusahaan kontraktor yang bertanggung jawab dalam aspek teknis proyek.

Namun, dalam praktiknya, keterlibatan stakeholder masih didominasi oleh pemerintah pusat. Keputusan strategis terkait proyek lebih banyak diambil oleh Kementerian PUPR, sementara pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana dan fasilitator di lapangan. Selain itu, meskipun proyek ini berdampak langsung pada

masyarakat sekitar, partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Wawancara dengan masyarakat terdampak menunjukkan bahwa mereka kurang mendapatkan akses informasi yang cukup terkait rencana proyek, proses pembebasan lahan, serta skema kompensasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan stakeholder belum berjalan secara inklusif dan transparan.

Agar *Collaborative Governance* dapat berjalan lebih efektif dalam proyek ini, perlu ada peningkatan transparansi, mekanisme dialog yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, serta distribusi peran yang lebih seimbang antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Dengan begitu melalui indikator pertama ini, mengenai Keterlibatan aktor-aktor, hal ini sejalan dengan kriteria Ansell dan Gash (2007), yaitu forum diinisiasi oleh institusi publik dan melibatkan aktor non-pemerintah. Proyek ini menunjukkan keberagaman dalam partisipasi, namun terdapat tantangan dalam memastikan semua suara terdengar dan diakomodasi.

B. Komunikasi dan Dialog dalam Pelaksanaan Proyek

Komunikasi antara aktor yang terlibat dalam proyek menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan proyek. Berdasarkan temuan

penelitian, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan melalui berbagai mekanisme formal seperti rapat koordinasi dan forum diskusi. Namun, dalam pelaksanaannya, komunikasi ini lebih bersifat *top-down*, di mana arahan dari pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan diskusi terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Penelitian ini menemukan beberapa pola komunikasi yang diterapkan dalam proyek Sodetan Ciliwung:

1. Komunikasi antar pemerintah pusat dan daerah, yang berlangsung melalui forum koordinasi teknis dan pertemuan formal di tingkat kementerian serta dinas terkait. Namun, komunikasi ini cenderung bersifat instruktif dari pusat ke daerah, sehingga pemerintah daerah lebih bersifat pasif dalam merespons kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Komunikasi dengan masyarakat, yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi proyek. Namun, sosialisasi ini kurang efektif karena hanya menyampaikan informasi tanpa melibatkan masyarakat dalam diskusi atau pengambilan keputusan. Banyak warga yang merasa bahwa informasi yang diberikan tidak transparan dan baru mengetahui proyek setelah tahap konstruksi dimulai.
3. Koordinasi antaraktor, yang melibatkan berbagai instansi, seperti BBWS

Ciliwung-Cisadane dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Namun, koordinasi ini belum berjalan optimal karena masih terdapat perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan daerah terkait dampak lingkungan dan sosial proyek.

Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa efektivitas komunikasi dan koordinasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga dalam konteks sosialisasi proyek kepada masyarakat, komunikasi masih menghadapi kendala yang signifikan.

C. Keputusan Bersama dalam Implementasi Proyek

Dalam teori *Collaborative Governance*, keputusan bersama (joint decision-making) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas kolaborasi antar-aktor. Namun, dalam proyek ini, keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa adanya mekanisme deliberatif yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat secara lebih luas. Keputusan utama seperti desain teknis proyek, lokasi sodetan, serta metode pembebasan lahan lebih banyak ditentukan oleh Kementerian PUPR dengan keterlibatan minimal dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini

mencerminkan bahwa pola pengambilan keputusan dalam proyek ini lebih bersifat *top-down*, di mana pemerintah pusat menjadi aktor dominan dalam menentukan kebijakan strategis.

Dalam kata lain, sebagai Proyek Strategis Nasional, Sodetan Ciliwung berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan utama lebih banyak dilakukan oleh Kementerian PUPR, dengan keterlibatan pemerintah daerah yang lebih bersifat administratif dan teknis. Dominasi pemerintah pusat dalam proyek ini terlihat dalam beberapa aspek berikut:

1. Penetapan kebijakan dan perencanaan proyek yang dilakukan tanpa konsultasi intensif dengan pemerintah daerah, sehingga beberapa kebijakan kurang mempertimbangkan kondisi spesifik di lapangan.
2. Proses pembebasan lahan, yang menjadi salah satu hambatan utama proyek ini, lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan proses relokasi warga terdampak tidak berjalan dengan lancar karena koordinasi dengan pemerintah daerah kurang optimal.
3. Pengambilan keputusan terkait perubahan desain atau teknis proyek yang dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR tanpa melibatkan Pemprov DKI Jakarta dalam

proses evaluasi.

Ketidakseimbangan dalam proses pengambilan keputusan ini berpotensi menyebabkan ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas implementasi proyek di lapangan.

D. Transparansi dalam Pelaksanaan Proyek

Salah satu tantangan utama dalam proyek ini adalah kurangnya transparansi, terutama dalam aspek penyebaran informasi kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdampak, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait tahapan proyek, dampak yang ditimbulkan, serta kompensasi yang akan mereka terima akibat proyek ini.



Gambar 0.1 Proyek Sodetan Ciliwung di Inlet Sodetan Ciliwung

Berikut merupakan foto langsung diolah penulis saat berkunjung untuk meneliti fisik Proyek Sodetan Ciliwung pada Inlet Sodetan Ciliwung di Kelurahan

Bidara Cina, Jakarta Timur, hal ini selaras karena memang aksesibilitas terhadap Fasilitas yang sebelumnya diujar oleh Stakeholder pendiri proyek bahwa terbuka untuk masyarakat pun hingga 2025 belum ada kejelasan kapan akan dibuka untuk publik, hal ini selaras dengan transparansi informasi yang tidak jelas terhadap masyarakat.

Selain itu, akses terhadap dokumen publik terkait proyek ini juga sangat terbatas. Dokumen semacam analisis dampak lingkungan (AMDAL) serta kajian teknis proyek tidak dipublikasikan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana proyek ini dirancang dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya transparansi ini memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan resistensi terhadap proyek.

Keterlibatan masyarakat dalam proyek infrastruktur skala besar seperti SodeTan Ciliwung menjadi elemen penting dalam memastikan keberlanjutan dan penerimaan sosial terhadap proyek. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat hanya dijadikan objek kebijakan tanpa mendapatkan ruang yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif. Temuan utama terkait keterlibatan masyarakat juga penulis temukan dan narasikan dalam poin:

1. Minimnya informasi terkait proyek yang diberikan kepada warga terdampak, menyebabkan banyak dari mereka yang merasa tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang manfaat maupun dampak proyek ini.
2. Keterbatasan akses masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana forum-forum konsultasi lebih banyak dihadiri oleh aparat pemerintah daerah tanpa melibatkan perwakilan warga secara langsung.
3. Kurangnya program mitigasi sosial yang ditujukan untuk membantu warga yang terdampak oleh proyek ini, terutama mereka yang mengalami relokasi akibat pembebasan lahan.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proyek ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial yang dapat menghambat kelancaran proyek di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih inklusif agar masyarakat dapat menjadi bagian dari proses perencanaan dan implementasi proyek.

E. Evaluasi dan Tindak Lanjut Proyek SodeTan Ciliwung

Evaluasi terhadap proyek SodeTan Ciliwung menjadi aspek penting dalam menilai efektivitasnya dalam mengurangi banjir di Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian, proyek ini memang memiliki

dampak positif dalam mengalihkan sebagian aliran Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), yang diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Dalam kerangka Collaborative Governance, suatu kebijakan atau proyek dikatakan berhasil apabila melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara setara dalam perencanaan dan implementasi.

Namun, dalam implementasinya, proyek ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam aspek teknis dan sosial. Secara teknis, beberapa pihak menyatakan bahwa kapasitas sodetan masih perlu ditingkatkan agar dapat mengalirkan air secara lebih optimal. Sementara itu, dari aspek sosial, masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat proyek ini, terutama mereka yang lahannya terkena dampak pembangunan sodetan. Berdasarkan temuan penelitian ini, implementasi Collaborative Governance dalam proyek Sodetan Ciliwung masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

1. Ketimpangan dalam pembagian peran, di mana pemerintah pusat mendominasi pengambilan keputusan, sementara pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan.
2. Minimnya dialog antara pemerintah dan masyarakat, yang menyebabkan proyek ini kurang mendapatkan legitimasi sosial dari warga terdampak.

3. Kurangnya transparansi dalam penyebaran informasi, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan proyek.

Dengan demikian, meskipun proyek ini telah menunjukkan keberhasilan dalam aspek teknis mitigasi banjir, dari perspektif *Collaborative Governance*, masih terdapat banyak aspek yang perlu diperbaiki agar proyek dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan sebagai tindak lanjut, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan mekanisme transparansi dan partisipasi publik agar proyek-proyek serupa di masa mendatang dapat berjalan lebih baik dan lebih diterima oleh masyarakat.

F. Implikasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam proyek ini, antara lain:

1. Meningkatkan transparansi informasi, terutama dalam tahap perencanaan dan evaluasi proyek, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan risiko proyek secara lebih komprehensif.
2. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi lokal serta

melibatkan aktor-aktor daerah dalam proses pengambilan keputusan.

3. Membuka ruang partisipasi bagi masyarakat, melalui forum konsultasi publik yang lebih inklusif, sehingga warga terdampak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan solusi yang lebih baik.
4. Mengembangkan mekanisme komunikasi yang lebih efektif, baik melalui pertemuan langsung, media digital, maupun pendekatan berbasis komunitas agar informasi proyek dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada masyarakat.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses kolaborasi, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki peran yang seimbang dalam implementasi proyek ini.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan proyek Sodetan Ciliwung dapat menjadi contoh keberhasilan dalam penerapan *Collaborative Governance* yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodetan Ciliwung, dapat disimpulkan bahwa bentuk kolaborasi yang diterapkan belum sepenuhnya berjalan secara setara. Berdasarkan analisis menggunakan teori *Collaborative Governance* dengan lima

indikator utama—keterlibatan stakeholder, komunikasi dan dialog, keputusan bersama, transparansi, serta evaluasi dan tindak lanjut—terdapat beberapa aspek yang belum berjalan optimal, terutama dalam transparansi dan partisipasi masyarakat. Proyek Sodetan Ciliwung secara formal telah melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kontraktor sebagai aktor utama, namun partisipasi masyarakat masih sangat minim. Meskipun proyek ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta, masyarakat terdampak sering kali kurang mendapatkan akses informasi yang jelas terkait dampak proyek, proses pembebasan lahan, serta skema kompensasi yang diberikan. Keterbatasan transparansi dalam penyebaran informasi ini telah menyebabkan resistensi di kalangan warga terdampak.

Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih belum sepenuhnya efektif. Pemerintah daerah memiliki peran sebagai jembatan antara pusat dan masyarakat, namun perbedaan prioritas kebijakan serta kendala birokrasi sering kali menghambat kelancaran proyek. Hal ini terlihat dari proses pembebasan lahan yang mengalami berbagai penundaan, baik karena masalah administratif maupun adanya perlawanan dari warga. Dengan demikian, proyek Sodetan Ciliwung masih lebih bersifat top-

down, di mana keputusan utama lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat, dengan keterlibatan masyarakat yang masih terbatas. Oleh karena itu, agar proyek-proyek serupa dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang, perlu adanya peningkatan dalam aspek transparansi, partisipasi aktif masyarakat, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam Proyek Strategis Nasional Sodeban Ciliwung, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan keberlanjutan proyek serupa di masa depan:

1. Meningkatkan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pemangku Kepentingan: Diperlukan mekanisme komunikasi yang lebih sistematis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Koordinasi lintas sektor yang lebih kuat dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat pengambilan keputusan.
2. Mempercepat Proses Pembebasan Lahan dan Sosialisasi ke Masyarakat: Pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang sering menjadi kendala utama proyek infrastruktur. Selain

itu, diperlukan sosialisasi yang lebih masif melalui FGD, diskusi publik dan forum konsultasi agar masyarakat terdampak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan

3. Memperkuat Penerapan Collaborative Governance: Implementasi tata kelola kolaboratif (Collaborative Governance) harus terus diperbaiki dengan melibatkan semua pihak secara aktif dalam setiap tahap proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Peningkatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga diperlukan agar seluruh pihak memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proyek.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek Infrastruktur: Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengedepankan partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dengan melibatkan masyarakat sejak awal, terutama dalam aspek pengawasan dan pemeliharaan proyek, maka manfaat jangka panjang dari proyek ini dapat lebih maksimal dan keberlanjutannya lebih terjaga.
5. Melakukan Evaluasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Secara Berkala: Setelah proyek selesai, perlu dilakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala untuk memastikan infrastruktur tetap

berfungsi optimal dalam mengatasi banjir. Selain itu, perlu ada transparansi dalam penyampaian hasil evaluasi kepada masyarakat.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung: Regulasi yang lebih jelas dan tegas perlu diterapkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi dalam pengelolaan banjir dan infrastruktur berkelanjutan harus terus dikembangkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam proyek strategis nasional dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- CNN Indonesia. (2023, 11 Juli). *Jokowi Resmikan Sodetan Ciliwung: Kurangi 62% Banjir Jakarta*. Diakses dari www.cnnindonesia.com.
- Irawan, D. (2016). *Collaborative Governance: Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya*. Skripsi, Universitas Airlangga.
- Kompas. (2023, 5 Februari). *Sodetan Ciliwung: Sejarah, Manfaat, dan Tantangan di Lapangan*. Diakses dari www.kompas.com.
- Putra, Y. A. R. (2024). *Analisis Collaborative Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Rahmadani, D. A. (2022). *Pengorganisasian Masyarakat Ciliwung dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sufianti, E. (2014). *Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non-Kolaboratif*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 1–12.
- Sunu Astuti, R., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press.
- Tempo. (2023, 20 Maret). *Proyek Sodetan Ciliwung: Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah*

dalam Penanganan Banjir
Jakarta. Diakses dari
www.tempo.co